

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemerintahan yang dapat disebut juga sebagai suatu organisasi ditinjau dari peran dan fungsinya merupakan suatu Lembaga yang melayani masyarakat dengan memiliki program-program untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam memfasilitasi masyarakat. Peningkatan anggaran belanja pemerintah diharapkan juga berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ataupun manfaat yang diterima oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, mendorong harapan publik akan perlunya pemeriksaan pada setiap program maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan erat dengan anggaran belanja pemerintah baik pusat maupun daerah contoh seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada pemberlakuan otonomi daerah yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembangunan , dan kemandirian di daerah. Maka dari itu, daerah harus dapat menjalankan roda organisasi dengan baik, transparan , dan akuntabel.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran pada pemerintah terutama pemerintah daerah untuk memperlihatkan kemampuan mengelola dalam pembiayaan kegiatan pelaksanaan pelayanan terhadap publik dan pembangunan di daerah. Dalam diberlakukannya kegiatan pemerintah daerah

tersebut, seringkali dikaitkan dengan sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan meruginya sebuah institusi. Maka dari itu, dalam Lembaga pemerintahan atau juga disebut organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for Money* sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban kepada publik.

Value For Money sendiri merupakan sebuah konsep penilaian suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Melalui konsep *value for money*, dapat memberikan informasi mengenai anggaran (dana) yang dibelanjakan apakah dapat menghasilkan suatu nilai tertentu pada masyarakat atau tidak. Selain penilaian finansial dalam konsep *value for money* terdapat pula penilaian yang sifatnya non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten, yang dapat memenuhi ekspektasi pelanggan.

Manfaat *value for money* yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran yang menimbulkan terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Menurut Mardiasmo (2000), manfaat penerapan *value for money* bagi sektor publik dan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas public.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan suatu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan melalui upaya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat atau perencanaan pembangunan partisipatif. Pada perencanaan pembangunan partisipatif ini adalah pola pendekatan yang melibatkan peran masyarakat yang bukan sebagai objek tetapi sekaligus sebagai objek pembangunan, sehingga dapat mengembangkan perencanaan pembangunan yang benar-benar dari bawah dengan kebijakan pembangunan kota, kebijakan pembangunan provinsi, dan kebijakan pembangunan nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Lembaga pemerintah daerah yang teknis yang mempunyai tugas pokok dan dalam fungsi perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sendiri yaitu merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang berguna dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu yang tertentu. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial perencanaan pembangunan daerah,

dibutuhkannya perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), diperlukan dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam program lima tahun mendatang dan harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan. Rencana strategis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Rancangan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Bitung sendiri disusun dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kota Bitung yang merupakan penjabaran visi dan misi Kota Bitung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung selanjutnya mempelajari hubungan visi, misi, dan program Walikota Bitung terhadap tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, kemudian menyusun rencana strategis yang sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rancangan rencana strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bitung berisi informasi tentang sumber daya, dana, keluaran dan dampak.

Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Model *value for money* mengukur dengan analisis varian yakni membandingkan antara *input* dan *ouput* yang direncanakan dengan *input* dan *output* aktualnya. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan actual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi actual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian dengan keluaran menurut rencana.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ekonomi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung ?
2. Apakah efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung ?
3. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat menguji apakah ekonomi mempengaruhi akuntabilitas Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung.
2. Agar dapat menguji apakah efisiensi mempengaruhi akuntabilitas Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung.
3. Agar dapat menguji apakah efektivitas mempengaruhi akuntabilitas Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung.

1.4. **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan kajian yang dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis atau siapa saja yang berminat mengetahui lebih dalam mengenai konsep *value for money* dan penerapannya dalam sektor pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
Sebagai sumbangan pemikiran kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bitung dalam pencapaian kinerja pelayanan melalui pendekatan *value for money* dan bisa menjadi masukan dalam penyusunan kinerja pelayanan di masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang.